

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PELAKSANAAN
AKAD *MUDHĀRABAH MUQAYYADAH* DALAM KERJASAMA DI
BUMDES JAYA BERSAMA
(Studi di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku
Timur Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Anggi Prasetyo Utomo
NPM :1521030170

Jurusan: Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PELAKSANAAN AKAD
MUDHĀRABAH MUQAYYADAH DALAM KERJASAMA
DI BUMDES JAYA BERSAMA
(Studi di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku
Timur Sumatera Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ANGGI PRASETYO UTOMO

NPM: 1521030170

Program Studi : Muamalah

**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.
Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Sebagai daerah yang otonom desa berhak mendapatkan sumber pendapatan, baik dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kekayaan milik desa merupakan aset desa yang semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat desa sekarang hingga mendatang. Untuk mengelola kekayaan desa serta menghidupkan perekonomian desa, maka didirikanlah lembaga sesuai amanat dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Perencanaan, pendirian dan pelaksanaan diprakarsai oleh masyarakat desa. Kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, serta tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Akad *Mudhārabah Muqayyadah* Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama VI Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur Sumatera Selatan dan 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad *Mudhārabah Muqayyadah* Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan pada masyarakat serta pihak BUMDes di desa Batumarta VI Untuk mendapatkan data yang valid digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Praktik kerjasama *Mudhārabah Muqayyadah* antara pihak BUMDes dan masyarakat pengelola pada awalnya adalah pihak BUMDes ingin menjadikan usaha pertamini tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu pihak BUMDes mencari masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan untuk mengelola usaha pertamini, lalu terpilihlah beberapa masyarakat yang akan menjalankan usaha tersebut. Bentuk akad yang terjadi dalam perjanjian ini adalah akad secara lisan dan tertulis antara pihak BUMDes dan masyarakat pengelola, yang di dalam surat itu dijelaskan bahwa pembagian hasil dari usaha yang didirikan BUMDes hasilnya adalah 55% untuk pihak BUMDes dan 45% untuk masyarakat pengelola. Namun, dalam praktiknya yang terjadi di lapangan setelah usaha pertamini sudah berjalan dengan baik dan keuntungannya semakin besar, pembagian 45% itu hanya terjadi di awal saja setelah itu pada bulan-bulan selanjutnya pembagiannya sudah tidak sesuai dengan akad awalnya. Kesimpulannya adalah bahwa tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad *Mudhārabah Muqayyadah* atau kerjasama bagi hasil usaha antara BUMDes dan masyarakat pengelola merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan syariat Islam. dalam hal ini, akad sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi praktiknya pihak BUMDes tidak memberikan hak pembagian yang sesuai kepada masyarakat dengan akad awal yang sudah ditentukan hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam serta tidak sesuai dengan asas *al'adalah* di dalam akad dan juga tidak sesuai dengan syarat sahnya *mudhārabah* dimana pembagian keuntungan harus dijelaskan di awal dan dalam praktiknya harus sesuai dengan akad tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : **Anggi Prasetyo Utomo**
NPM : **1521030170**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama (Studi di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

NIP: 197403072000121002

Pembimbing II

Juhrotul Khulwah, M.S.I.

NIP: 199107092018012002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Akad Mudhārabah Muqayyadah Dalam Kerjasama Di Bumdes Jaya Bersama (Studi di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)**, Disusun oleh: **Anggi Prasetyo Utomo, NPM : 1521030170, Progam Studi Muamalah.** Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Tanggal 16 Desember 2019.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua : **Gandhi Liyorba Indra, M.Ag** (.....)

Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I.** (.....)

Penguji Utama : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A** (.....)

Penguji II : **Juhrotul Khulwah, M.S.I** (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹ (Q.S Al-Māidah (5):2)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 106.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Susilo Rajudin dan Ibunda Sumiyati yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntunku pada tahap sejauh ini ayah dan ibunda tercinta.
2. Kedua Adikku Hanifah Nurul Aini dan Muhammad Fahri Nugroho, terimakasih karena telah menemani ayah dan ibu sejak mamas merantau jauh dari mereka.
3. Anggun Dianitami yang selalu mensupport disaat lelah dengan skripsi ini.

Bandar Lampung, 1 November 2019

Anggi Prasetyo Utomo

NPM 1521030170

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Anggi Prasetyo Utomo, dilahirkan pada tanggal 27 Juni 1997 di Batumarta VI Oku Timur. Anak Pertama dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Susilo Rajudin dan Ibu Sumiyati.

Riwayat pendidikan pada :

1. RA Darussalam Batumarta VI Oku Timur Sumatera Selatan, pada tahun 2002 sampai tahun 2003.
2. SD Negeri 1 Trans Batumarta VI Oku Timur Sumatera Selatan, pada tahun 2004 sampai tahun 2009.
3. MTS Darussalam Batumarta VI Oku Timur Sumatera Selatan, pada tahun 2010 sampai tahun 2012
4. MA Darussalam Batumarta VI Oku Timur Sumatera Selatan, dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Mua'malah (Hukum Ekonomi Islam) tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama (Studi di Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur Sumatera Selatan)” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. KH. Khoiruddin, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. Selaku Pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku pembimbing II Sekaligus Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah yang telah banyak meluangkan waktu

untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap staff akademik UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Sahabat-sahabatku semuanya, yang telah membantu dan memberi dukungan serta do'a selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah A 2015
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca Aamiin.

Bandar Lampung, 1 November 2019

Anggi Prasetyo Utomo

NPM. 1521030170

DAFTAR ISI

COVER LUAR`	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
G. Signifikan Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	16
1. Pengertian Akad	16
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Rukun Akad	19
4. Syarat Akad.....	31
5. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Akad	32
6. Macam-macam Akad	35
7. Berakhirnya Akad	37
B. <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	38
1. Pengertian <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	38
2. Dasar Hukum <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	39
3. Rukun Syarat <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	41
4. Sifat <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	43
5. Kedudukan <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	43

6. Pembatalan <i>Mudhārabah Muqayyadah</i>	44
C. Tinjauan Pustaka	45

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Desa Batumarta VI	51
B. Sejarah Berdirinya BUMDes	67
C. Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil <i>Mudhārabah Muqayyadah</i> di Desa Batumarta VI	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil <i>Mudhārabah Muqayyadah</i> di BUMDes Jaya Bersama	74
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Akad <i>Mudhārabah Muqayyadah</i> di BUMDes Jaya Bersama	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tata Guna Tanah	56
2. Jumlah Rukun Tetangga	56
3. Jumlah Penduduk Tiap Dusun.....	57
4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Batumarta VI	58
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat	59
6. Sarana Prasarana Pendidikan Desa.....	60
7. Sarana dan Prasarana Kesehatan	61
8. Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	62



DAFTAR BAGAN

9. Organisasi Pemerintah Desa Batumarta VI.....	64
10. Badan Permusyawaratan Desa	65
11. Majelis Pertimbangan Desa.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka sebagai kerangka awal perlu adanya uraian secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad *Mudhārabah Muqayyadah* dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama (Studi di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)”. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.³
3. Akad berasal dari bahasa Arab *al'āqad* yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.⁴

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) Cet II, h.1470

³ Mohammad Rusfi, *Pengertian Hukum Islam*, Al-Adalah Vol. Xiii, No. 2, Desember 2016, h.241.

⁴ A Warson Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al Munawir* (Yogyakarta: Pongpes Al-Munawir, 1984), h.197.

4. *Mudhārabah muqayyadah* adalah akad kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola, dimana nisbah keuntungan bagi hasil dari akad itu disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan akad bagi hasil *mudhārabah muqayyadah* dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Dalam Kerjasama bagi hasil *mudhārabah muqayyadah* di BUMDes Jaya Bersama, kesepakatan yang tertulis dipembagian hasil yang ditetapkan BUMDes dengan masyarakat pengelola sudah sangat jelas dan benar, namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian bagi hasil *mudhārabah muqayyadah* awal, dimana praktik yang dilakukan di dalamnya ada unsur ketidakadilan BUMDes Jaya Bersama kepada masyarakat pengelola, oleh karena itu jika praktik pelaksanaan pembagian hasil yang berlangsung tidak adil, maka secara tidak langsung praktik tersebut merugikan bagi pihak yang lemah.

⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) Cet-1, h.119.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari bahasan, maka skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan di muka bumi, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia seperti dalam jual beli, bagi hasil dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan dan menggunakan harta yang menjadi milik hamba tersebut, Allah telah menetapkan sistem dan aturan yang harus diikuti oleh manusia. Aturan tersebut tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Saw. Dalam bentuk prinsip dan asas muamalah. Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas tersebut manusia bias mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.⁶

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya bermukim di pedesaan. Sehingga gerakan membangun pedesaan dirasa perlu untuk meningkatkan masyarakat pedesaan. Gerakan membangun desa bisa terwujud apabila tingkat kesadaran masyarakat dan pemerintah sudah terjalin harmonis. Pemerintah bisa berperan penting dalam mensukseskan gerakan membangun desa, karena desa berhubungan langsung dengan permasalahan masyarakat.

⁶ Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta" Jurnal *Al-adalah*, Vol. 13, No.2, h. 243. (On-line) Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>. (Dikses pada 11 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB).

Dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan desa maka diperlukannya partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan program pembangunan. Partisipasi bisa dimaknai dengan masyarakat ikut andil dengan proses pembuatan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan menikmati hasil dari pembangunan. Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat suatu badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Badan tersebut didirikan untuk meningkatkan perekonomian dan aset desa.

Badan usaha yang dimaksudkan oleh kementerian desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa secara bersama-sama dalam upaya memperkuat perekonomian desa.

BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu BUMDes dibentuk dengan tujuan:⁷

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan umum warga

⁷ Permen Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), Pasal 3.

5. Membuka lapangan kerja
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Landasan dibentuknya BUMDes sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan agar tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka BUMDes harus membuat suatu usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Adapun jenis usaha yang dikelola dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu:

1. Usaha jasa memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM), usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan agrobisnis
4. Industri dan kerajinan rakyat

Dalam usaha jasa memenuhi BBM, BUMDes bisa melakukan usaha untuk menyediakan BBM. Usaha tersebut bisa berupa perdagangan atau kerjasama bagi hasil guna untuk mendapatkan keuntungan.

Adanya peluang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan kebutuhan BBM di desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, oleh karena itu berdirilah BUMDes yaitu dalam jasa pemenuhan kebutuhan BBM yang bernama BUMDes Jaya Bersama. BUMDes Jaya Bersama untuk hal ini berusaha menyediakan BBM sebagai kebutuhan masyarakat desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan dikarenakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang disediakan oleh pemerintah sangat jauh serta terkendalanya akses jalan yang kurang baik. Sementara itu kebutuhan BBM di desa tersebut cukup tinggi. Dalam hal kerjasama bagi hasil, BUMDes Jaya Bersama melakukan kerjasama bagi hasil dengan masyarakat pengelola.

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan harus sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari koridor hukum Islam⁸.

Mudhārabah muqayyadah adalah akad kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola, dimana keuntungan bagi hasil dari akad itu

⁸ Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h.177.

disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal.⁹

Kerjasama yang dilakukan antara BUMDes dan masyarakat pengelola awalnya adalah kerjasama berbentuk bagi hasil yang dapat dikategorikan dengan bagi hasil *mudhārabah muqayyadah*, dimana BUMDes adalah pemilik modal serta penentu jenis usaha yang akan dijalankan oleh masyarakat pengelola, dan keuntungan bagi hasil tersebut telah disepakati dari awal sebesar 45% untuk masyarakat pengelola dan 55% untuk pemilik modal.

Namun praktik yang terjadi dalam usaha pertamini BUMDes yang dikelola oleh masyarakat tidaklah sesuai dengan perjanjian awal bagi hasil tersebut, karena nyatanya bagi hasil yang awalnya 45% untuk masyarakat pengelola ternyata yang diberikan oleh BUMDes hanya 15% dari keuntungan bersih usaha pemenuhan BBM tersebut.

Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum syara' sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S *An-Nisā* (4) ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat”.¹⁰

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.145.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.220.

Berdasarkan uraian tersebut menarik untuk diteliti tentang pelaksanaan akad bagi hasil usaha BUMDes Jaya Bersama dan bagaimana Islam memandang pelaksanaan akad bagi hasil tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Akad *Mudhārabah Muqayyadah* Dalam Kerjasama Di BUMDes Jaya Bersama” (Studi di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan)”).

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini. Maka penulis memfokuskan untuk meneliti suatu praktik pelaksanaan pembagian hasil akad *mudhārabah muqayyadah* dalam usaha pertamini yang dimiliki oleh BUMDes Jaya Bersama dan dikelola oleh masyarakat desa Batumarta VI.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Akad *Mudhārabah Muqayyadah* Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama VI Kec. Madang Suku III Kab. Oku Timur Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad *Mudhārabah Muqayyadah* Dalam Kerjasama di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan bagi hasil *mudhārabah muqayyadah* dalam kerjasama di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik pelaksanaan bagi hasil *mudhārabah muqayyadah* dalam kerjasama di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan menurut pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat sebagai sambungan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terdapat praktik bagi hasil yang mungkin akadnya sudah sesuai namun praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikasi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah pembagian hasil akad *mudhārabah muqayyadah* dalam usaha pertamini antara BUMDes dan masyarakat pengelola.

2. Signifikan Praktis

Signifikan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemilik dan pengelola usaha pertamini untuk meningkatkan komitmen kerjasama serta menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama sesuai hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung untuk mengetahui terjadinya kerjasama bagi hasil.¹² Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada pihak BUMDes Jaya Bersama dan masyarakat pengelola.

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h.2-3.

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Madar Maju, 1986), h.27.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlanjut dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pandangan Islam tentang praktik pelaksanaan akad bagi hasil *mudhārabah muqayyadah* di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Oku Timur Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁵ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pihak BUMDes Jaya Bersama dan Masyarakat pengelola.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet.7, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.81.

¹⁴ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

¹⁵ *Ibid.*, h.60.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁶ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik kerjasama akad *mudhārabah muqayyadah* di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian populusi, karena semua narasumber diambil sebagai sumber data pada penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 5 (lima) pengurus BUMDes dan 2 (dua) orang pengelola usaha BUMDes.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁸ Sehubungan dengan populasi yang berjumlah kurang dari 100, yakni hanya 7 (tujuh) responden maka semua responden yang ada dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi.

¹⁶ *Ibid.*, h.120.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, S*, (Jakarta: UI pres, 2012), h.172.

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.81.

c. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan tentang praktik pelaksanaan akad bagi hasil *mudhārabah muqayyadah* di BUMDes Jaya Bersama desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak BUMDes Jaya Bersama dan masyarakat pengelola yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas dan diteliti. Pada praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pihak tersebut terkait dengan permasalahan yang tertera sebelumnya di atas yang selanjutnya akan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.105.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, laporan, agenda, dan lainnya.²⁰

d. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan merugikan.²¹ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*systemating*)

Bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²² dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

e. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisa.

Matode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991) Cet-7, h.201.

²¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.115.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991) Cet-7, h.65.

dengan kajian penelitian, yaitu bagaimana pandangan Islam tentang praktik pelaksanaan akad bagi hasil *mudhārabah muqayyadah* di BUMDes Jaya Bersama. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.



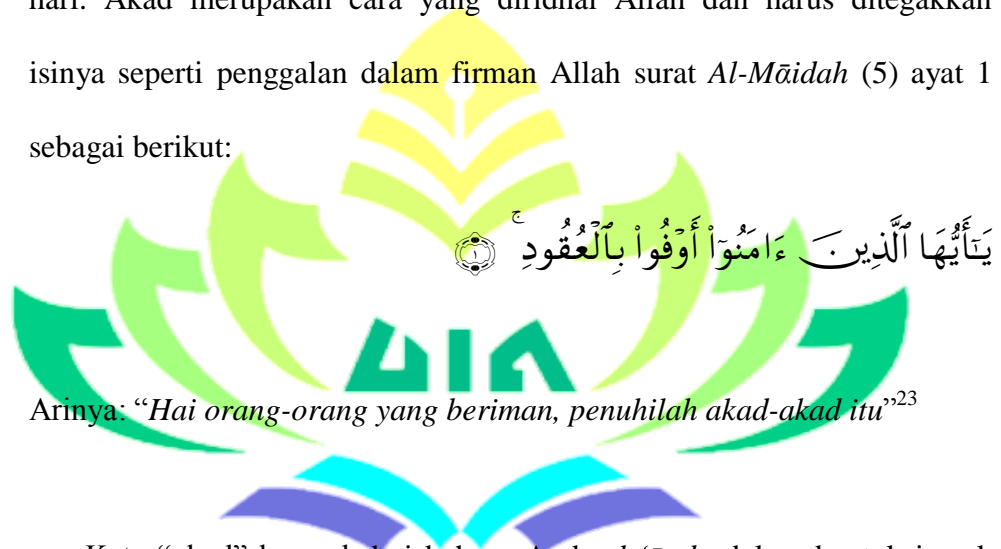
BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya seperti penggalan dalam firman Allah surat *Al-Māidah* (5) ayat 1 sebagai berikut:



Arinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”²³

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘āqdu* dalam bentuk jamak di-sebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijāb* dan *qobūl* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²⁴ Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.141.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.44.

belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan dalam *ijāb qobūl*, Kesesuaian dengan kehendak syariah, adanya akibat hukum pada objek perikatan.²⁵

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, gadai.²⁶

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijāb* (pernyataan penawaran atau pemindahan hak kepemilikan) dan *qobūl* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁸

2. Dasar Hukum Akad

Prinsip dasar “akad” adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum dalam setiap akad. Hal ini tergantung dari segi lazim (mempunyai

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group), h.71.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Presss, 2017), h.35.

²⁸ *Ibid.*, h.72.

kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat lazim, maka berkewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat *jaiz*, hanya sebatas disunnahkan saja, karena termasuk kebajikan yang dianjurkan syara'.²⁹

Berikut ini adalah dalil-dalil akad yang bersumber dari Al-Qur'an dalam Q.S *Al- isrā* (17) ayat 34 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.³⁰

Penggalan Q.S *Al-Baqarah* (2) ayat 177:

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا... ﴿١٧٧﴾

Artinya: “...Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji...”.³¹

²⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.7.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.285.

³¹ *Ibid.*, h.27.

Penggalan Q.S *Al-Māidah* (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³²

Dasar hukum akad berdasarkan hadist:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.³³

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW “Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)

3. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan, keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:³⁴

- a. ‘*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, mereka sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.106.

³³ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalni, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum dalam Fiqh Islam Cet Ke II* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.490.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.47.

terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki orang yang memiliki hak dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. *Ījāb* dan *qābul* yang oleh hanafiah dipandang sebagai satu satunya rukun akad, timbul dari orang-orang yang melakukan akad, dialah pelaku dari setiap transaksi.

Namun, tidak setiap orang layak untuk menyatakan suatu akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad.

Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun mewakili orang lain. Dengan demikian, ada dua hal yang perlu di bahas berkaitan dengan rukun akad yang pertama, yakni '*āqid*, yaitu:

1. *Ahliyyāh* (kecakapan)

2. *Wilāyah* (kekuasaan)

1) *Ahliyyāh* (kecakapan)

Ahliyyāh atau kecakapan terbagi kepada dua bagian, yaitu *ahliyyāh al-wujūb* dan *ahliyyāh al-ada*'. *ahliyyāh al-wujūb* adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Sedangkan *ahliyyāh al-ada*' adalah kecakapan seseorang melaksanakan hak dan kewajiban. Secara global orang yang

memiliki *ahliyyāh al-ada*’ adalah orang yang baligh dan berakal serta terbebas dari ‘*awālīd ahliyyāh*’ atau penghalang kecakapan.

2) *Wilāyah* (kekuasaan)

a) Pengertian *Wilāyah*

Wilāyah dalam arti bahasa adalah

تَوَلَّى الْأَمْرَ وَالْقِيَامَ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ.³⁵

Artinya: “Menguasai persoalan dan melaksanakannya”.

Menurut istilah syara’, pengertian wilayah itu adalah:

هِيَ سُلْطَةُ شَرْعِيَّةٍ يَتِمَّكَّنُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ إِنْشَاءِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ وَتَنْفِيزِهَا أَيْ تَرْتِيبُ الْأَثَارِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهَا.³⁶

Artinya: “Wilayah adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh syara’ yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan tasarruf dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Wilāyah* adalah kekuasaan yang diberikan oleh syara’ kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad, kecakapan (*ahliyyāh al-ada*’-nya) tidak sempurna, misalnya masih dibawah umur. Perbedaanya dengan *ahliyyāh al-ada*’ adalah, *ahliyyāh al-ada*’ merupakan syarat untuk sahnya akad. Apabila

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.116.

³⁶ *Ibid.*,

ada *ahliyyāh al-ada'* tidak ada maka akad menjadi batal. Sedangkan *wilāyah* (kekuasaan) merupakan syarat untuk kelangsungan akad dan timbulnya akibat-akibat hukum. Syaratnya ia harus memiliki *ahliyyāh al-ada'*. Apabila *ahliyyāh al-ada'*-nya tidak sempurna, maka ia tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dengan memandang kepada hubungan antara *ahliyyāh* dan *wilāyah* maka hukum akad itu ada tiga macam:³⁷

- (1) Apabila orang yang melakukan akad kecakapannya nya sempurna dan ia mempunyai *wilāyah* (kekuasaan), maka akadnya sah dan dapat dilangsungkan, kecuali apabila di dalamnya ada kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini orang yang merasa dirugikan tersebut bisa meluluskan atau menghalanginya, sehingga akadnya ditangguhkan.
- (2) Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki *ahliyyāh* sama sekali dan memiliki *wilāyah* (kekuasaan) maka akad akan menjadi batal, seperti akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum *mumayyiz*. Apabila akad itu dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyyāh al-ada' nāqishah* (tidak sempurna), seperti anak *mumayyiz*, maka akadnya sah apabila menguntungkan 100%, dan batal apabila merugikan

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.115.

100%, serta (ditangguhkan) menunggu persetujuan wali, apabila akadnya itu mungkin menguntungkan dan mungkin merugikan.

- (3) Apabila akad dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyyāh al-ada'* sempurna, tetapi ia tidak memiliki *Wilāyah* (kekuasaan) untuk melakukan transaksi, maka adanya itu disebut akad *fudhūli*, dan hukum akadnya ditangguhkan menunggu persetujuan dari orang yang memiliki barang.

b) Macam-macam *Wilāyah* (kekuasaan)

Wilāyah (kekuasaan) terbagi kepada dua bagian:

- (1) Asli, dalam arti seseorang mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad bagi dirinya, karena ia memiliki kecakapan sempurna;

- (2) Perwakilan, dalam arti seseorang mendapat kekuasaan untuk mengurus kepentingan orang lain, *Wilāyah* perwakilan terbagi kepada dua bagian:

- (a) *Ikhtiyāriyah*, yaitu suatu pemberian kekuasaan untuk melakukan *tasharruf* atas nama orang lain dengan sukarela.

- (b) *Ijbāriyah*, yaitu suatu pemberian kekuasaan oleh syara' atau pengadilan untuk melakukan usaha guna kemaslahatan orang yang berada dibawah

pengampuan, seperti kekuasaan seorang ayah, kakek, atau pemegang wasiat terhadap anak dibawah umur, dan kekuasaan hakim atas anak yang berada dibawah pengampuan. Dalam contoh ini sumber kekuasaan dari ayah, kakek, atau hakim adalah syarat, sedangkan sumber kekuasaan pemegang wasiat adakalanya atas pemilihan oleh ayah atau kakek, atau karena pernyataan hakim.

- b. *Ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan atau objek akad, objek akad adalah segala sesuatu yang dijadikan sasaran atau tujuan akad. Jenisnya kadang-kadang benda yang bersifat ibadah harta, seperti barang yang dijual, digadaikan, atau dihibahkan, dan adakalanya bukan ibadah harta, seperti perempuan dalam akad nikah, dan adakalanya berupa manfaat, seperti benda yang disewakan.³⁸

Dalam kenyataan ini tidak semua benda bisa dijadikan objek akad. Hewan babi misalnya bagi muslim tidak bisa dijadikan objek akad, karena bukan harta yang boleh diambil manfa'atnya. Perempuan yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan nasab atau susuan tidak bisa dijadikan objek akad nikah. Benda-benda

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.118.

yang dibolehkan untuk dijadikan objek akad adalah benda-benda yang memenuhi syarat.³⁹

Para *fuqaha*, sebagaimana dikutip oleh wahbah zuhaili, mengemukakan ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad antara lain:⁴⁰

1. Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad. Apabila benda tersebut tidak ada pada waktu akad maka akadnya tidak sah, seperti anak sapi yang masih dalam kandungan induknya karena mungkin lahir dalam keadaan mati, atau buah durian sebelum muncul (keliatan) karena kemungkinan tidak berbuah. Syarat ini berlaku dikalangan Hanafiah dan Syafi'iyah, baik adanya itu akad *mu'awadhāh* (tukar-menukar) maupun akad *tabarrū'*. Akan tetapi, mereka mengecualikan dari ketentuan umum ini untuk akad *salām* (pesanan), *ijarāh*, *musāqoh*, dan *istishna*. Dalam akad-akad ini meskipun barangnya belum ada, hukumnya tetap sah dengan berpegang kepada *istishna*, karena akad-akad ini sangat dibutuhkan oleh manusia.⁴¹

Malikiyah mencukupkan syarat yang pertama ini hanya dalam akad *mu'awadhah*, sedangkan untuk akad-akad *tabarru'* seperti hibah dan wakaf, syarat ini tidak diperlukan, yang penting barang tersebut mungkin akan ada pada masa datang.

³⁹ *Ibid.*, h.119

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), h.102.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h.128.

Sedangkan Hanabilah tidak mensyaratkan hal ini. Mereka melarang melakukan akad terhadap barang-barang yang mengandung penipuan, seperti menjual anak sapi yang masih di dalam rahim induknya. Jadi, Hanabilah menitik beratkan syarat ini pada adanya unsur penipuan, bukan ada atau tidak adanya barang.⁴²

2. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara', yang dalam istilah fiqh muamalat disebut *māl mutaqāwwim*. Apabila objek akadnya bukan *māl mutaqāwwim*, maka akadnya batal. Contoh *māl ghāir mutaqāwwim* seperti babi, bangkai dan minuman keras. Demikian pula apabila objek akadnya itu benda-benda mubah yang belum dimiliki, seperti burung yang masih berterbangan di udara, ikan di dalam air laut, dan kijang di hutan belukar.

3. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad. Apabila barang tersebut tidak bisa diserahkan pada waktu akad, maka akad ini menjadi batal. Syarat ini menurut kesepakatan *fuqaha* berlaku dalam akad-akad *mu'awadhāh*, dan menurut Imam Malik memperbolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarrū'*. Namun, Imam Malik memperbolehkan dijadikan objek akad dalam akad tabarru' terhadap barang-

⁴² *Ibid.*, h.129.

barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.

4. Barang yang dijadikan objek akad haruslah jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui, maka *tasharruf* menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukan barangnya apabila barang ada di tempat akad, dengan dilihat, atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut. Syarat ini menurut kesepakatan fuqaha berlaku di dalam akad *mu'awadhāh maliyāh*. Adapun untuk akad *ghāir mu'awadhāh*, maka para ulama berbeda pendapat, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan juga di dalam akad *mu'awadhāh ghāir maliyāh* seperti akad nikah, dan akad *tabarrū'*, seperti hibah dan wakaf. Hanafiah tidak mensyaratkan dalam akad *tabarrū'* seperti wasiat dan *kafalah*. Malikiyah hanya mensyaratkan di dalam akad *mu'awadhāh maliyāh*, sedangkan untuk akad *mu'awadhāh ghāir maliyāh* dan akad *tabarrū'* tidak mensyaratkannya.
5. Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *mutānajis*. Syarat yang kelima ini dikemukakan oleh jumhur ulama selain Hanafiah. Dengan demikian, barang-barang yang tidak suci atau najis dan tercampur najis tidak sah dijadikan objek akad. Contoh benda yang najis seperti anjing,

babi dan darah. Contoh *mutānajis* seperti susu benda-benda yang diperselisihkan najisnya untuk dijadikan objek akad, seperti burung bulbul yang didengarkan suaranya, bukan dimaksudkan dagingnya. Akan tetapi, kelompok Hanafiah tidak mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu, mereka memperbolehkan menjual jenis barang yang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai untuk dimanfaatkan, kecuali benda-benda yang jelas dilarang, seperti bangkai dan darah. Pedoman yang digunakan oleh Hanafiah adalah setiap benda yang manfaatnya halal menurut syara' maka benda tersebut boleh dijual, karena benda diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S *Al-Baqarah* (2) ayat 29:



هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu*”.⁴³

- c. *Maudhū' al-‘āqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h

ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwādh*).

- d. *Shīghat al-‘āqd* ialah *ījāb* dan *qabūl*, *ījāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ījāb*.

Hal hal yang harus di perhatikan dalam *shīghat al-‘āqd* ialah:⁴⁴

1. *Shīghat al-‘āqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ījāb qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “aku serahkan barang ini”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian”.
2. Harus bersesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan *qabūl* berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ījāb* dan *qabūl* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.

⁴⁴ Sohari Ru’fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.42.

3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.⁴⁵

- a. Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua ‘*āqid* berjauhan tempatnya, maka *ījāb* dan *qabūl* dengan cara *kitābah*.
- b. *isyārat*, bagi orang-orang tertentu akad atau *ījāb* dan *qabūl* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ījāb qabūl* dengan bahasa, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu mengadakan *ījāb* dan *qabūl* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab *qabul* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, *qabūl* atau akad dilakukan dengan isyarat.
- c. *Ta’āthi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besaran imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.48-49.

berikut “sesorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”. Proses seperti ini dinamakan *ta’āthi*, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

- d. *Lisān al hāl*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan jalan *dalālat al-hāl*.

4. Syarat Syarat Akad

Setiap pembentukan ‘*āqad*’ atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, Syarat-syarat yang bersifat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.

⁴⁶ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan 'āqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulāsamah*.⁴⁷
- e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila *rāhn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. *ījāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g. *ījāb* dan *qabūl* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka *ījāb* tersebut menjadi batal.

5. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Akad

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lain.⁴⁸

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian).

Asas ini berpengaruh dalam suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi,

⁴⁷ Jual beli *mulasamah* adalah jual beli yang dimana pembeli jika menyentuh barang jualan seseorang itu artinya dia harus membeli dan jual beli ini dilarang syara' (<https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulasamah-jual-beli-munabadzah-jual-beli-hashah-jual-beli-muhaqalah-html>)

⁴⁸ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 39.

maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak atau perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. *Al-Hūrriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*); baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. *Al-Musāwah* (Kesetaraan)

Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

c. *Al-‘Adālah* (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

⁴⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.21.

d. *Ar-Ridhā* (Kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

e. *Ash-Shāddiq* (Kejujuran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f. *Al-kitābah* (Tertulis)

Akad harus dilakukan dengan melakukan *kitābah* (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu perlu ada pihak saksi, *rāhn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:⁵⁰

1. *Ījāb* dan *Qabūl*. *ījāb qabūl* harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. *ījāb qabūl* bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.

⁵⁰ *Ibid.*, h.27.

2. Pelaku Kontrak. Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.
3. Objek akad. Objek kontrak secara umum harus ada atau terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli *salam*, *istishnā'*, dan *ijārah*, karena pertimbangan maslahat dan telah menjadi '*ūrf*'.
4. Akibat hukum kontrak. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya, hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara'. Maka akad dibagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.⁵¹ Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:

a. Akad *Shahīh*

Akad *Shahīh* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1984), h.231.

akibat hukum yang ditimbulkan akad-akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *Nāfiʿ* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *Maūquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk, melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

b. Akad Tidak *Shahīh*

Akad tidak *Shahīh* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: akad *bāthil* dan akad *fāsid*. Suatu akad dikatakan *bāthil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad *fāsid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

1. 'Akad *Mūnjiz*

Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah

pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.⁵²

2. *'Akad Mu'ālaq*

Adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

3. *'Akad Mudhāf*

Adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penangguhan pelaksanaan akad pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.

7. Berakhirnya Akad

Akad berakhir apabila:⁵³

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyār*

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.50-51.

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo), h.35.

syarat, *khiyār aib*, atau *khiyār ruqyah*, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

B. *Mudhārabah muqayyadah*

1. Pengertian *Mudhārabah Muqayyadah*

Berasal dari kata *al-dhārb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S *Al-Muzzammil* 20 sebagai berikut:



وَأٰخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

Artinya: “Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”.⁵⁴

Selain *al-dhārb*, disebut juga *qirādh* yang berasal dari *al-qārdhu*, berarti *al-qāth’u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi, menurut bahasa, *mudhārabah* atau *qiradh* berarti *al-qath’u* (potongan), berjalan, dan bepergian.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.574.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h.135.

Sedangkan *mudhārabah muqayyadah* sendiri adalah bagian dari *mudhārabah* yang artinya yaitu penyerahan modal dengan menentukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat usahanya, siapa yang mengerjakannya atau mengelolanya, serta membeli dan menjual barang dari orang tertentu.

2. Dasar Hukum *Mudhārabah Muqayyadah*

Melakukan *mudhārabah* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasulullah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ

Artinya: “ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual”.⁵⁶

Diriwayatkan dari *daruquthni* bahwa hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku”.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, h.301

⁵⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.25.

Dalam *al-Muwaththa'* Imam Malik, dari al-A'la Ibn Abd al-Rahman Ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Utsman r.a sedangkan keuntungannya dibagi dua.⁵⁸

Qirādh atau *mudhārabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, beliau tau dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, nabi Muhammad telah melakukan *qirādh*, yaitu nabi Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau.⁵⁹

Ulama fiqh sepakat juga bahwa *mudhārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an antara lain:

Q.S Al-Jumū'ah (62) penggalan ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah".⁶⁰

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 189

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu".⁶¹

⁵⁸ Ibid., h.26.

⁵⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.159.

⁶⁰ Ibid., h.553.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak melarang seorang hambanya untuk mencari rezeki di bumi untuk kehidupan sehari-hari, asalkan rezeki yang dicari adalah rezeki halal dan tidak mengandung riba. Seperti firman Allah SWT pada Q.S An-Nisā' (4) ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.⁶²

3. Rukun dan Syarat *Mudhārabah Muqayyadah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudhārabah* ada enam, yaitu:⁶³

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. Akad *mudhārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. *Māl*, yaitu harta pokok atau modal;
5. 'Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudhārabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2006), h.29.

⁶² *Ibid.*, h.83.

⁶³ Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.205.

Syarat-syarat sah *mudhārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudhārabah* itu sendiri antara lain sebagai berikut:⁶⁴

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal haruslah jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, ataupun seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudhārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu,

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.283

memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain

4. Sifat *Mudhārabah Muqayyadah*

Ulama fiqih sepakat bahwa akad dalam *mudhārabah* sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim apabila sudah dijalankan oleh pekerja, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat diwariskan.

5. Kedudukan *Mudhārabah Muqayyadah*

Hukum *mudhārabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudhārabah* (*qirādh*) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek *wakālah*.⁶⁵

Ketika dikelola oleh pengelola, harta tersebut di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menggantinya.

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Sinar Baru: Algensindo, 2007), h.300.

Ditinjau dari segi akad, *mudhārabah* terdiri atas dua pihak, bila ada keuntungan dalam pengelola uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudhārabah* juga sebagai *syirkah*.⁶⁶

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudhārabah* dianggap sebagai *ijārah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudhārabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudhārabah*, kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelola dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*.⁶⁷

6. Pembatalan *Mudhārabah Muqayyadah*

Mudhārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut.⁶⁸

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudhārabah*. Jika salah satu syarat *mudhārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi

⁶⁶ *Ibid.*, h.58.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid III (Bandung: Al ma'rif, 1997), h.165.

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.243.

tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudhārabah* menjadi batal.
4. Pemilik modal murtad, yaitu apabila pemilik modal keluar dari Islam atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanafiah, hal itu membatalkan *mudhārabah*, sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli waris.
5. Modal rusak di tangan pengusaha, artinya jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudhārabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudhārabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Meyrisa Tria Andryani (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha bengkel dinamo di pelabuhan Gresik dilakukan dengan cara pihak pertama menanamkan modal pada usaha bengkel, sedangkan pihak kedua (pengusaha) bertugas untuk mengelola usaha pada bengkel tersebut. Praktik kerjasama antara pemilik dan pengelola telah ditentukan bahwa setiap bulan penanam modal akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari modal yang ditanamkan, sedangkan pengelola akan mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal namun selama kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola usaha maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut Merysa pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo penetapan pembagian keuntungan yang telah ditentukan diawal ini

bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan apabila usaha tersebut ramai pengunjung ataupun sepi maka penanam modal akan tetap mendapatkan keuntungan sebesar 10%, menurut hukum Islam akad kerjasama bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo tidak diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur riba dan akadnya menjadi fasid karena melanggar syarat sahnya akad yaitu adanya penentuan keuntungan pada awal akad perjanjian serta adanya unsur ketidakjelasan pada pembagian keuntungan untuk pengusaha. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Merysa Tria Andryani adanya unsur tolong menolong dan menggunakan akad secara lisan dan tertulis serta sama-sama melanggar syarat sahnya akad. Perbedaannya adalah bagi hasil dalam penelitian Merysa Tria Andryani akadnya fasid serta mengandung unsur riba di dalamnya.

2. Penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Cuci Mobil Dengan Pengelola”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha cuci mobil kusuma utama dilakukan dengan cara pemilik berkerja sama dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola cuci mobil yang mana modal tersebut sepenuhnya berasal dari pemilik yang diserahkan kepada pengelola dan hasilnya dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Praktik kerjasama antara pemilik dan pengelola yaitu pendapatan dikurangi modal, sehingga dari sisa hasil keuntungan tersebut barulah dibagi dua, untuk pemilik 50% dan pengelola

50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi menjadi dua. Pembagian dilakukan dengan akad secara lisan apabila pemilik dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

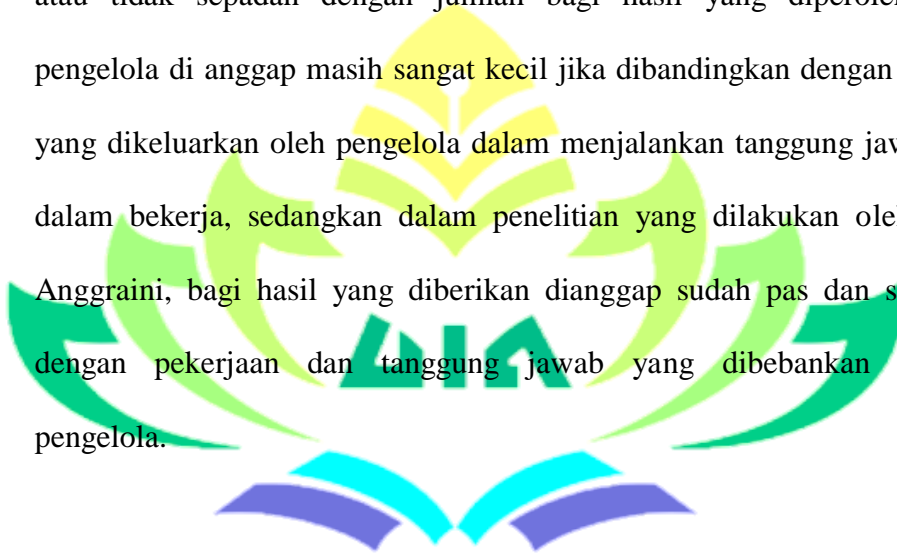
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ferinda Tiaranisa menyimpulkan bahwa untuk memastikan usaha tersebut lancar, maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat pekerjaan sudah selesai dilakukan, baik dalam perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. Penerapan bagi hasil tersebut merupakan kerjasama yang mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan konsep *mudhārabah muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Namun seringkali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudhārabah muqayyadah* seperti yang beliau paparkan yang mana konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa adalah kesepakatan yang disepakati oleh pemilik dan pengelola sama-sama menggunakan akad lisan, kerusakan yang terjadi sama-sama ditanggung oleh pemilik usaha selama kerusakan

akibat dari kelalaian pengelola serta bagi hasil diberikan pada saat pekerjaan sudah diselesaikan (akhir bulan). Sedangkan perbedaannya antara lain bagi hasil yang diberikan 45% dari hasil keuntungan sementara yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa bagi hasil yang diberikan 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola yang diperoleh dari keuntungan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak”. Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertambakan ini dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun cara pembagian hasilnya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tambak karena pemilik tambak yang menyediakan pakan ikan juga bibit ikan untuk tambak tersebut. Dan pengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar $\frac{1}{3}$ cara pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian harusnya disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini adalah pemilik memperoleh bagi hasil lebih besar dibanding pengelola hal ini dikarenakan pemilik menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan usaha, dan pengelola hanya menjalankan saja, kesepakatan tersebut sama-sama dilakukan secara lisan dan disepakati dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Sedangkan perbedaannya adalah perbandingan jumlah bagi hasil dan pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini dianggap belum sesuai atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh pengelola di anggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam bekerja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini, bagi hasil yang diberikan dianggap sudah pas dan sepadan dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pengelola.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalni, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum dalam Fiqh Islam* Cet Ke II Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Munawir A Warson, *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rineke Cipta, 2014.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Presss, 2017.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1984.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II Edisi IV Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanuddin M, Sahroni Oni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah (Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Kedua Edisi keempat Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset* Bandung: Madar Maju, 1986.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, Kencana penada media Group, 2012.
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian* Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* Cet-1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Permen Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang *Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Pasal 3.

Permen Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), Pasal 3.

Raco J.R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo, 2008.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru: Algensindo, 2007.

Ru'fah Sohari, *Fiqh Muamalah*, Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.

Rusfi Mohammad, *Pengertian Hukum Islam*, Al-Adalah Vol. Xiii, No. 2, Desember 2016.

Rusfi Muhammad, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta" Jurnal *Al-adalah*, Vol. 13, No.2, h. 243. (On-line) Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>. (Dikses pada 11 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB).

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* Jilid III, Bandung: Al ma'rif, 1997.

Sahari Sohari dan Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, S, Jakarta: UI pres, 2012.

Sohari Sahari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.